FORMULASI KEBIJAKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS TANPA KEMISKINAN DALAM PERENCANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA PALEMBANG (STUDI KASUS PADA BAPPEDA LITBANG KOTA PALEMBANG)

Ichsan Al Kautsar[1], Dian Anggraini[2]

[1,2]*Universitas Sriwijaya*
E-mail : robiatunsiti11@gmail.com

ABSTRACT

Poverty is a major problem for the government. This is why coordination meetings on poverty alleviation development planning are frequently held to reduce the poverty rate. Poverty is evident in the large number of homeless people, street children, and the high crime rate. Therefore, it is important to study how poverty alleviation policies are formulated as a manifestation of the Sustainable Development Goals "No Poverty" guidelines implemented by the Palembang city government. The purpose of this study is to determine the mechanism of poverty alleviation planning policy formulation in Palembang (a case study of the Palembang City Bappeda Litbang) as a regional development planning agency. Using qualitative methods, data collection through interviews, observations, and documentation studies, it was found that the formulation was carried out properly according to procedures, although problems were encountered, such as suboptimal updates to poverty data. Therefore, to anticipate similar issues, more thorough and optimal coordination is needed to prevent future problems.

Keywords : *Formulation, Sustainable Development Goals, Planning, Poverty*

ABSTRACT

Kemiskinan adalah masalah utama bagi pemerintah, hal ini selalu menjadi persoalan utama sehingga sering dilakukan rapat koordinasi perencanaan pembangunan penanggulangan kemiskinan demi menekan angka tingkat kemiskinan. Kemiskinan dapat dibuktikan dari banyaknya gelandangan, anak jalanan, dan tingkat kriminalitas yang masih tinggi. Oleh karena itu penting dalam mempelajari bagaimana formulasi kebijakan penanggulangan kemiskinan ini sebagai perwujudan dari pedoman Sustainable Development Goals “No Poverty” yang diterapkan oleh pemerintah kota Palembang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme formulasi kebijakan perencanaan penanggulangan kemiskinan dikota Palembang (studi kasus pada Bappeda Litbang Kota Palembang) sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah. Dengan menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data lewat wawancara, observasi, dan studi dokumentasi ditemukan bahwa formulasi dijalankan dengan baik sesuai prosedur walaupun permasalahan ditemukan seperti pada update kebaruan data kemiskinan yang belum optimal. Sehingga untuk mengantisipasi hal serupa diperlukan koordinasi yang lebih matang dan optimal agar tidak terjadi permasalahan dimasa yang akan datang.

Kata Kunci : *Formulasi, Sustainable Development Goals, Perencanaan, Kemiskinan*

PENDAHULUAN

SDGS atau biasa disebut dengan *Sustainabel Development Goals* Adalah suatu kesepakatan negara yang ada di dunia untuk menuju kehidupan global yang lebih sejahtera. Menurut (Irhamsyah, 2019) SDGs merupakan "suatu program dunia jangka panjang untuk mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh tiap negara". Indonesia sebagai salah satu negara yang mengadopsi pedoman ini tentunya berupaya untuk melaksanakan mulai dari tingkat nasional hingga ke tingkat daerah atau provinsi. Kemiskinan adalah suatu isu utama global yang menjadi fokus paling utama didalam program *Sustainable Development Goals* (SDGs). Kemiskinan adalah kata yang sangat sering terdengar, yaitu "ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar supaya dapat hidup dengan layak". (Sutiyo & Hasna, 2024). Pada tingkat daerah, terutama dikota Palembang kemiskinan ini terus ditekan dan diupayakan penurunannya. Berdasarkan data pada Rancangan Akhir RPJMD Kota Palembang Tahun 2025-2029, tingkat kemiskinan berada diangka 9,77% pada tahun terakhir yaitu 2024. Angka ini sangat menunjukkan bahwa meskipun telah mengalami angka penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, kemiskinan masih menjadi persoalan utama pemerintah Kota Palembang saat ini, yang mengakibatkan belum cukup signifikan dalam menjawab target pembangunan berkelanjutan. Ini dikarenakan persoalan pemerintah daerah khususnya dikota palembang masih terkait permasalahan kemiskinan.

Fenomena kemiskinan ini menjadi masalah utama terutama bagi kota Palembang. Sering kali program bantuan seperti bantuan langsung tunai maupun berbagai macam seperti bantuan pendidikan telah dilakukan “namun program tersebut belum sepenuhnya mampu mensejahterakan masyarakat miskin” (Triani et al., 2020). Lalu (Aryani & Rachmawati, 2024) mengatakan bahwa telah banyak berbagai macam bantuan diberikan oleh pemerintah namun faktanya program-program seperti kesehatan atau pendidikan belum sepenuhnya berhasil mengentaskan kemiskinan. Kemudian kemiskinan ekstrem dikota Palembang sangat memprihatinkan, terdapat 33.800 ribu jiwa berada digaris kemiskinan ekstrem pada tahun 2022 data terakhir dan hal ini diukur dari kurangnya pendapatan, tempat tinggal, maupun kebutuhan makanan (Lestari & Rusdi, 2024). Disisi lain dapat juga dilihat seperti banyaknya anak jalanan, gelandangan, hingga pengemis di kota Palembang sangat memprihatinkan sehingga membuat tingkat kriminalitas meningkat. (Khoirin et al., 2020) menyatakan bahwa pertumbuhan jumlah anak-anak jalanan juga akan menambah tingkat kriminalitas. Hal ini mengakitbatkan dampak negatif terhadap pembangunan. Kemiskinan yang masih menjadi persoalan ini akhirnya penting untuk melihat bagaimana mekanisme formulasinya. Formulasi kebijakan pada konteks yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye dalam (Kadji, 2015) menjelaskan bahwa pemerintah sebagai aktor dalam membuat kebijakan harus mampu untuk memilih kebijakan yang bermanfaat atau optimal bagi masyarakat, dan formulasi kebijakannya harus dilaksanakan berdasarkan tahapan-tahapan yang ada. Sehingga apabila dilakukan dengan benar dan sistematis maka akan menghasilkan kebijakan yang sesuai terhadap permasalahan yang ada ditengah masyarakat. Jika melihat penelitian terdahulu banyak menyoroti terkait implementasi, evaluasi, maupun efektivitas kebijakan. Dari sinilah kemudian muncul celah untuk meneliti terkait formulasi kebijakan penanggulangan kemiskinan seperti apa karena formulasi adalah tahapan awal yang akan menentukan apakah kebijakan tersebut memberikan dampak optimal atau tidak terhadap publik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme formulasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dikota Palembang dilaksanakan oleh badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan kota palembang. Penelitian ini

memilih model teori formulasi kebijakan rasional dari Thomas R. Dye dalam (Kadji, 2015) yang menyatakan bahwa pada formulasi kebijakan pemerintah selaku regulator kebijakan harus dapat mampu dalam memilih kebijakan yang memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Terdapat lima urutan formulasi kebijakan pada model rasionalitas ini di antaranya adalah: mengetahui preferensi publik dan kecenderungannya, menemukan pilihan-pilihan, menilai konsekuensi pilihan, menilai rasio sosial yang dikorbankan, dan pemilihan alternatif kebijakan yang paling efektif.

Tinjauan Pustaka

Kemiskinan adalah kondisi sosial yang pasti dimiliki oleh setiap negara yang ada di dunia salah satunya negara berkembang. Di Indonesia sendiri kemiskinan merupakan masalah kompleks karena memiliki beberap faktor di antaranya seperti, pengaruh lingkungan, pengangguran, hingga kurangnya pendidikan. Menurut (Busti, 2022) mendefinisikan "kemiskinan suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi standar kebutuhan dasar rata-rata pada suatu daerah". Kemiskinan yang dimaksud adalah dimana suatu orang atau keluarga tidak memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Disisi lain dapat juga dilihat seperti banyaknya anak jalanan, gelandangan, hingga pengemis di kota Palembang sangat memprihatinkan sehingga membuat tingkat kriminalitas meningkat. (Khoirin et al., 2020) menyatakan bahwa pertumbuhan jumlah anak-anak jalanan juga akan menambah tingkat kriminalitas. Hal ini mengakitbatkan dampak negatif terhadap pembangunan. Tujuan pertama program *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam bahasa Indonesia disebut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu "Tanpa Kemiskinan". Dunia bersepakat untuk hidup di tahun 2030 yang lebih damai dan sejahtera. Oleh karena itu, program yang pertama tanpa kemiskinan ini adalah menjadikan dunia tidak ada kemiskinan dalam bentuk apa pun (Sofianto, 2019). Lewat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentunya menjadi alat dalam menekan kemiskinan ini.

Kebijakan publik penting pada kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya terdapat suatu keputusan yang dibuat atas kesepakatan bersama untuk dirasakan bersama manfaatnya demi kehidupan yang lebih teratur. Salah satu keputusan tersebut seperti sebuah kebijakan publik. "Kebijakan publik merujuk pada serangkaian tindakan yang dirancang oleh pemerintah atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat" (Iriawan, 2024). "Kebijakan publik adalah langkah yang dipilih oleh pemerintah untuk dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan." Dye dalam (Purnama & Chotib, 2022). Sedangkan pendapat Menurut Faradillah Putra dalam (Andriyanto & Purnaweni, 2017) mendefinisikan "formulasi kebijakan dapat diartikan sebagai sebuah langkah yang paling awal di dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan". Formulasi ini juga tidak melibatkan satu organiasasi saja tetapi melibatkan berbagai macam lembaga dalam koordinasinya, pentingnya suatu kolaborasi antar pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat itu sendiri menjadikannya kunci untuk mencapai tujuan dalam pemberdayaan masyarakat (Anggraini et al., 2025). Formulasi kebijakan publik diartikan bahwa kebijakan sebelum ditetapkan melewati serangkaian proses perancangan atau penyusunannya. Ini adalah proses mekanisme bagaimana kebijakan publik dibuat sehingga optimal atau tidaknya dapat dilihat apakah formulasi dijalankan sesuai prosedur.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hal ini karena bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana formulasi kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh Bappeda litbang kota Palembang. Dari penjelasan inilah kemudian akan menjadikannya suatu hasil yang lebih maksimal dalam mengetahui bagaimana perencanaan penanggulangan kemiskinan terkait formulasi kebijakan tersebut. Dengan fokus pada lembaga perencanaan pembangunan daerah penelitian dan pengembangan kota Palembang tentunya dapat memberikan informasi lebih spesifik terkait formulasi kebijakan yang dilaksanakan oleh organisasi pada bidang perencanaan pembangunan daerah. Kemudian teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara secara mendalam, observasi kelapangan, dan studi dokumentasi dilakukan untuk proses pengumpulan data secara lengkap dan akurat. Dengan melibatkan berbagai macam pihak seperti informan tambahan dari dinas sosial kota Palembang dan lembaga badan Amil zakat nasional kota Palembang diharapkan mampu memberi penjelasan secara lengkap terkait formulasi kebijakan yang dilakukan secara bersama lewat koordinasi antar pihak atau organisasi perangkat daerah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Formulasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Bappeda litbang kota Palembang ini tentunya menggunakan teori yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye. Jika melihat dari teori yang pertama terkait mengetahui preferensi publik dan kecenderungannya atau penyerapan aspirasi dan kebutuhan publik dilakukan lewat musyawarah berjenjang dari tahap bawah seperti kelurahan sampai ke tahap kota. Setelah itu barulah dibuat dan di masukan berbagai macam usulan ke dalam sistem internal yang bernama (SIPD) sistem informasi pemerintahan daerah berisikan berbagai macam usulan kebijakan yang dimasukkan oleh para organisasi perangkat daerah untuk diverifikasi dan dibawa ke dalam rapat koordinasi untuk didiskusikan. Tahapan yang kedua yaitu menemukan pilihan-pilihan yaitu di mana Bappeda litbang kota Palembang menyusun usulan-usulan tersebut yang didapat dari informasi dan data berbagai macam organisasi perangkat daerah, maupun data dari badan pusat statistik dan Musrenbang yang telah dilaksanakan. Lalu tahap selanjutnya dibawa ke bagian menilai konsekuensi pilihan, dalam hal ini Bappeda litbang kota Palembang akan menganalisis setiap dampak baik itu potensi dan juga risiko berbagai macam usulan atau opsi kebijakan sehingga nantinya dapat dilihat mana yang lebih mendekati terhadap permasalahan atau fenomena yang ada di masyarakat dalam hal ini terkait kemiskinan. Setelah itu, masuk ke tahapan yang Keempat menilai rasio sosial yang dikorbankan artinya akan dilihat dan diteliti mana yang harus lebih menjadi prioritas dibandingkan usulan lainnya. Dari perbandingan inilah akan disusun suatu kebijakan atau program penanggulangan kemiskinan itu dari yang prioritas sampai program setelahnya. Tahapan yang ke empat ini memang menjelaskan secara mendetil kenapa harus dilakukan perbandingan karena tidak mungkin dilakukan atau ditetapkan suatu kebijakan itu secara bersamaan untuk dijadikan sebagai prioritas, oleh karena itu harus dipilih mana yang mendekati kebutuhan masyarakat dan menjadikannya sebagai prioritas dibandingkan hal lain. Dan yang terakhir tahapan pilihan alternatif kebijakan yang paling efektif. Pada tahapan yang terakhir akan dinilai tentunya berdasarkan yang telah dipelajari bahwa mana kebijakan mendekati permasalahan atau kebutuhan masyarakat lalu dipilih untuk dijadikan sebagai prioritas. Hasilnya akan masuk ke dalam dokumen rencana pembangunan sebagai program yang

pertama di antara berbagai macam program karena dinilai lebih menjawab permasalahan lapangan atau kebutuhan dari masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi didapatkan kesimpulan bahwa seluruh tahapan terkait koordinasi formulasi kebijakan dijalankan dengan baik dan sesuai prosedur peraturan. Namun, menurut pendapat dari salah satu lembaga yang bergerak di bidang penyaluran bantuan sosial mereka menemui bahwa kendala yang terjadi dalam penanggulangan kemiskinan ini terkait kebaruan data yang tidak optimal. Seperti salah satu contohnya itu, ada keluarga miskin yang terdata mendapatkan bantuan lalu karena pemerintah tidak mengetahui secara spesifik kondisi terkini dari keluarga tersebut maka sampai kapan pun akan mendapatkan bantuan sosial walaupun keadaan ekonomi mereka semakin lama semakin membaik atau sudah tidak tergolong miskin lagi. Inilah yang kemudian menjadi suatu kendala tersendiri atau permasalahan yang ditemui pada penelitian ini berdasarkan wawancara dengan badan Amil zakat nasional kota Palembang sebagai organisasi penyalur bantuan sosial kepada masyarakat miskin. Mereka mengharapkan terkait penanggulangan kemiskinan ini untuk terus mengoptimalkan kebaruan data dan meningkatkan koordinasi bersama antar perangkat daerah agar hal seperti ini tidak terjadi sehingga masyarakat tidak menyatakan penilaian buruk terhadap pemerintah. Kemudian, sebagian besar informan juga berpendapat bahwa terkait penanggulangan kemiskinan yang paling mendekati permasalahan yaitu program bantuan sosial. Karena bantuan sosial ini dampaknya dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan terdapat sosialisasi dan dedikasi dalam hal ini pemberdayaan masyarakat dalam program keluarga harapan sehingga menjadi alasan tersendiri mengapa bantuan sosial ini lebih dipilih atau menjadi pilihan yang efektif terhadap penanggulangan kemiskinan selain dampaknya secara langsung seperti pemberian uang tunai dan sembako.

KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah didapatkan pada penelitian ini maka formulasi kebijakan telah dijalankan sesuai dengan prosedur tanpa hambatan sekalipun. Bappeda litbang kota Palembang mengajak berbagai organisasi perangkat daerah untuk upaya menanggulangi kemiskinan serta koordinasi yang dilakukan semuanya telah berdasarkan prosedur dari tahap identifikasi masalah publik, mengumpulkan usulan, memilih agenda, dan mengesahkan suatu kebijakan. Kemudian, kebijakan yang dinilai paling efektif berdasarkan informasi dari beberapa informan yaitu terkait bantuan sosial seperti salah satunya itu program keluarga harapan. Di dalam program ini dinyatakan tentang sosialisasi ataupun dedikasi yang dilakukan untuk mengajak para masyarakat miskin semakin maju, mengubah mindset mereka tentang pemanfaatan bantuan yang diberikan oleh pemerintah sehingga dapat menuju kehidupan yang lebih baik. Adapun kendala yang dihadapi tentunya terkait pemanfaatan data yang kurang optimal atau terbarukan, sehingga bantuan sosial sering kali masih disalurkan berdasarkan data lama ataupun pihak berwenang tidak mengetahui kondisi terkini dari masyarakat yang membutuhkan bahwa mereka telah mengalami ataupun perekonomiannya semakin membaik.

Fenomena inilah yang menyebabkan munculnya kecemburuan sosial, sebagian masyarakat melihat bahwa salah satu keluarga mendapatkan bantuan sosial padahal telah dikatakan mampu padahal ini tidak diketahui dengan jelas atau spesifik oleh pemerintah karena memang belum adanya update data terbaru atau terjadi suatu hal secara tiba-tiba sehingga membuat orang yang dikatakan miskin itu berubah menjadi orang yang dikategorikan mampu. Oleh karena itu,

optimalisasi koordinasi dan juga pemanfaatan data yang lebih akurat dilakukan agar kendala seperti ini tidak terjadi lagi sehingga penanggulangan kemiskinan dapat berjalan dengan baik tentunya memperhatikan manfaat keseimbangan sosial dalam hal ini pemerataan bantuan dan tidak mementingkan kelompok tertentu saja atau dapat dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Andriyanto, F., Purnaweni, H. (2017). Analisis Stakeholders Dalam Formulasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, *6*(2), 745–758.

Anggraini, D., Fadhlia, M. N., & Sohyb, M. N. (2025). Penguatan Kearifan Lokal Jumputan Kenten Laut (JUMTELA) melalui Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. *Jurnal Abdimas Mandiri*. *9*(1), 136–142.

Arifin, J. (2025). Budaya Kemiskinan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia Culture Of Poverty In Poverty Reduction In Indonesia. *Jurnal Sosio Informa*, *6*(02), 114–132.

Aryani, D. S., & Rachmawati, Y. (2024). Tipologi Kemiskinan di Kota Palembang dengan Menggunakan Model Cibest. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, *10*(02), 93–98.

Binadi, A. (2017). *Penanggulangan Kemiskinan & Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta Deepublish.

Busti, R. (2022). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro). *Skripsi Sarjana. Repositori IAIN Metro*.

Engkus. (2022). *Kebijakan Publik (Konsep, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Serta Perubahan)*. PT. Kinshafi Alung Cipta.

Fahlevi. (2024). Kebijakan Sustainable Development Goals. *Skripsi Sarjana. Repositori UIN*.

Fauzi, A. N., & Rostyaningsih. (2018). Analisis Aktor Dalam Formulasi Kebijakan Semarang *Smart city*. *Jurnal Management & Public Policy*, *7(4)*, 1-18.

Grace, V., Syafii, M. (2021). Analisis Determinasi Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomika*, *5*(2), 125–133.

Gunawan. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik. Bumi Aksara.

Irhamsyah, F. (2019). Sustainable Development Goals (SDGs) dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional. *Jurnal Lemhannas RI*, *7(2)*, 45–54.

Iriawan, A. (2024). *Teori Kebijakan Publik*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

Kadji, Y. (2015). *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik*. UNG Press.

Khoirin, Purnawan, H., & Anggraini, D. (2020). Analisis Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan Oleh tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir melalui Kepala Daerah menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir mempunyai Program Pembinaan Anak Jalanan sebagai up. *Jurnal of Social Sciences and Politics*, *7*(2), 140–148.

Lestari, D. P., & Rusdi. (2024). Collaborative Governance : Model Implementasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Kota Palembang. *Jurnal IAPA*, 43–50.

Marwiyah, S. (2022). *Buku ajar Kebijakan Publik*.

Nugraha. (2017). Nugraha, I, A. (2017). Proses Formulasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. Jurnal Ilmu Politik, 8(2), 19-28..pdf. *Jurnal Ilmu Politik*, *8*(2), 19–28.

Permana, A., Maulida, A., Husaeni, F., A, H. M., Ruhimasari, S., & Surya, P. P. (2025). Pengertian , Unsur-Unsur Dan Perkembangan Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara Unsur yang Membentuk Definisi Kebijakan Publik. *Jurnal Penelitian Nusantara*, *1*(5), 453–457.

Purnama, & Chotib. (2022). Analisis Kebijakan Publik Pemindahan Ibu Kota Negara. Jurnal *Ekonomi & Kebijakan Publik*, *13*(2), 155–168.

Sinurat, R. (2023). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Registratie*, *5*(2), 87–103.

Sofianto. (2019). Integrasi Target Dan Indikator Sustainable Development Goals (Sdgs) Ke Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Jawa Tengah. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, *17*(1), 25–41.

Sutiyo., Hasna, A. (2024). *Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Sleman: Deepublish*.

Triani, Y., Panorama, M., & Sumantri, R. (2020). Analisis pengetasan kemiskinan di kota palembang. *Jurnal Ekonomi Islam*. *11*(2), 159–178.

Wafa, A., Angin, R. (2024). Formulasi Kebijakan Program Banyuwangi Hijau, dalam Mewujudkan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan (Studi di Desa Bunder, Kecamatan Kabat). *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, *9*(1), 1–14.

Yahya, Lengkong, & Dengo. (2018). Formulasi Kebijakan Pemerintah Sulawesi Utara Dalam Menyelesaikan Konflik Antara Transportasi Online Dengan Transportasi Konvensional. *Jurnal Administrasi Publik*, *4*(65), 1–13.